

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat suatu wilayah meningkat dalam jangka panjang. Suatu wilayah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi lebih cenderung memiliki ketimpangan pembangunan yang rendah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki pendapatan perkapita rendah, hal ini dikarenakan semakin tingginya pendapatan perkapita suatu wilayah maka pembangunan ekonomi wilayah tersebut dapat memicu tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan disertai kualitas taraf hidup yang baik (Pamiati & Woyanti, 2021).

Permasalahan serius seringkali melekat pada ketimpangan pembangunan dan jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merusak proses pembangunan yang diinginkan suatu wilayah serta memiliki sektor non-unggulan yang berat. Di Indonesia sendiri terlihat adanya wilayah maju dan kurang maju sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Maka disinilah peran pemerintah diperlukan dalam penyelesaian pertumbuhan ekonomi (Andhiani et al., 2018).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan, tetapi juga karena adanya perbedaan sumberdaya dan kondisi demografis. Perbedaan inilah yang mendorong suatu wilayah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan setiap wilayahnya berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan sektor wisata dalam mengelola sumber daya yang telah tersedia sehingga dapat terbentuk lapangan pekerjaan baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut (Maulana, 2019).

Dampak positif dari ketimpangan yaitu dengan mendorong wilayah lain yang masih tergolong tertinggal agar mampu bersaing dengan meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, dampak negatifnya yakni ekonomi yang tidak merata, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas sosial, serta tingginya tingkat ketimpangan yang akan sering dipandang tidak adil sehingga dampak negatif inilah yang menjadi akar masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2004).

Indonesia memiliki 33 provinsi dan 6 pulau, salah satunya adalah pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri memiliki 10 provinsi di dalamnya dengan potensi yang berbeda dan penggunaan teknologi yang berbeda pula (Umiyati, 2014). Kesepuluh provinsi tersebut tidak lepas dari masalah ketimpangan pembangunan yang perlu untuk diperhatikan lagi dikarenakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi dan tujuan pembangunan ekonomi demi menekan nilai ketimpangan yang ada.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di Pulau Sumatera adalah dengan menggunakan Index Williamson dengan hasil jika nilai Index Williamson mendekati angka 1, maka ketimpangan di wilayah tersebut termasuk tinggi dan sebaliknya, jika angka Index Williamson mendekati angka 0

maka ketimpangan di wilayah tersebut masuk dalam kategori rendah. Perkembangan Indeks Williamson sebagai alat pengukur ketimpangan antar wilayah di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Indeks Williamson Pulau Sumatera**  
**Tahun 2016-2020**

Provinsi	Rata-Rata
Aceh	0.33
Sumut	0.62
Sumbar	0.28
Riau	0.36
Jambi	0.48
Sumsel	0.77
Bengkulu	0.44
Lampung	0.32
Babel	0.21
Kepri	0.48

Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1, angka Indeks Williamson di setiap provinsi di pulau Sumatera memiliki persentase angka yang berfluktuatif pada setiap tahunnya. Angka Indeks tertinggi ada di wilayah Sumatera Selatan dengan nilai rata-rata dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 0,77 dan Indeks terendah ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai rata-rata sebesar 0,21. Pada umumnya, setiap wilayah hanya memikirkan bagaimana untuk terus tumbuh dan berkembang tanpa memperhatikan adanya pemerataan yang ada pada wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang kaya akan semakin kaya sedangkan wilayah yang miskin menjadi semakin miskin. Tingginya nilai Indeks Williamson menandakan bahwa hal ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketimpangan tersebut (BPS, 2020b).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan, salah satunya yakni tenaga kerja. Menurut Yusniar (2019), teori Sjafrizal mengatakan bahwa migrasi yang kurang lancar dalam suatu wilayah dapat mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga wilayah lain yang membutuhkan tenaga kerja tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Wilayah yang memiliki industri besar akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga penduduk yang hidup di wilayah tersebut lebih produktif daripada penduduk yang berada di wilayah tertinggal. Hal ini mengakibatkan pengangguran sehingga memicu tingginya angka ketimpangan pembangunan antarwilayah sehingga sulitnya mendorong proses pembangunan pada wilayah tersebut.

Tingkat keberhasilan pembangunan sendiri tidak hanya dapat diukur dari pembangunan bidang ekonomi, namun juga dapat dilihat dari sisi kualitas sumberdaya manusia dibidang indeks pembangunan manusia. Rendah dan tingginya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, apabila IPM rendah maka produktivitasnya juga akan ikut rendah sehingga pendapatan pun rendah, begitu pula sebaliknya jika IPM tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya dan diikuti dengan tingginya tingkat pendapatan di setiap wilayahnya (Islami & Nugroho, 2018).

Menurut Marliyanti & Arka (2014), pendapatan asli daerah memiliki peran sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah dikarenakan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan begitu, peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan yang ada.

Menurut Kurniawan & Sugiyanto dalam Azizah & Suhartini (2021) terdapat perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor industri setiap wilayahnya. Pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lebih cepat pada wilayah yang memiliki konsentrasi industri tinggi dibandingkan wilayah industri yang rendah. Selain itu, sektor pertanian dan pertambangan juga berperan dalam mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh potensi sumber daya di setiap wilayah berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Sektor Industri dan Sektor Pertambangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera dari Tahun 2016 sampai dengan 2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?

5. Bagaimana pengaruh kontribusi PDRB sektor industri terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020
4. Menganalisis pengaruh kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020
5. Menganalisis pengaruh kontribusi PDRB sektor industri terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020
6. Menganalisis pengaruh kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah pusat, sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi dan mengatasi angka tingkat ketimpangan pembangunan.
2. Bagi badan perencanaan pembangunan daerah, sebagai gagasan dan masukan untuk pembangunan kedepan agar lebih baik lagi.
3. Bagi dinas ketenagakerjaan, sebagai gambaran dalam upaya mewujudkan kesempatan kerja dan penyediaan peningkatan tenaga kerja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pembangunan.
4. Bagi dinas daerah, dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.
5. Bagi akademisi dan peneliti sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau peneliti terkait.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Alat dan Model Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Adapun persamaan estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}IW_{it} = & \beta_0 + \beta_1TK_{it} + \beta_2\text{Log}IPM_{it} + \beta_3\text{Log}PAD_{it} + \beta_4AGRI_{it} + \beta_5INDS_{it} \\ & + \beta_6MIN_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

di mana:

$IW_{it}$  = Indeks Williamson (angka indeks)

$TK_{it}$	= Persentase Orang yang Bekerja (persen)
$IPM_{it}$	= Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)
$PAD_{it}$	= Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)
$AGRI_{it}$	= Kontribusi PDRB sektor pertanian (persen)
$INDS_{it}$	= Kontribusi PDRB sektor Industri (persen)
$MIN_{it}$	= Kontribusi PDRB sektor pertambangan (persen)
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_3$	= Koefisien regresi variabel independen
$\varepsilon$	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
$i$	= Provinsi ke- $i$
$t$	= tahun ke $t$

## E.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan rentang waktu 5 tahun. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel, yakni gabungan antara data (*time series*) lintas waktu dan data (*cross-section*) lintas ruang dan individu. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik dan data kemenkeu DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang ketimpangan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antarwilayah di

Pulau Sumatera, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait ketimpangan pembangunan. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.

### BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi penelitian yang selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN